

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, S., Dwika, P., Dwimawanti, I. H., Administrasi, M. I., Ilmu, F., & Diponegoro, U. (2020). *Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal Implementation of Market Service Retribution Policy In The Adiwerna Market of Tegal Regency*. 2(3), 561–572. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.112>
- Arief, M. I. (2021). *Tentang Cipta Kerja dan Prinsip-Prinsip Penanganan Perkara Dunia*. Mekar Cipta Lestari.
- Dadang. (2020). *Kedudukan dan Fungsi Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan*. Pena Persada.
- Dawud, Joni, Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar, D. F. R. (2020). Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung). *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2), 83–92.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Di, K., & Pasirjambu, K. (2017). *Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan pasirjambu*. 2, 56–65.
- Hidayat, F., Sunarko, B. S., Magister, P., & Administrasi, I. (2018). *IMPLEMENTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP): PENDELEGASIAN KEWENANGAN SETENGAH HATI (Studi terhadap Penyelenggaraan PTSP di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi)*. 18(1), 144–163.
- Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). *Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)*. 2(1), 143–154.

- Keputusan Bupati Pangkep Nomor 503 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik
- Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) di Kabupaten Subang. *The World of Public*
- Lestariningsy, T., & Roqib, M. (2021). Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oss 1.1 Dan Oss Rba (Risk Basic Approach). *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 25–34. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1576>
- Manuhoro, A., Purnaweni, H., & Rengga, A. (2016). Implementasi Kebijakan Batas Usia Terendah Pengemudi Sepeda Motor Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy*, 1(1), 1–15.
- Maulana, A. T. (2021). *EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT PADA BADAN*. 10(2).
- Mayasiana, N. A. (2017). Tolak Ukur Kualitas Pelayanan Publik. *ParadigmaMadani*, 4(2), 75–80.
- Muhammad, B. (2021). *Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang- Undang Cipta Kerja*. 1(2), 16–29.
- Muhibuddin, A., & Mustafa, Z. (2021). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) KABUPATEN PANGKEP* *Implementation of a Policy of*

- Establishment Permit (IMB) in* I. 4(1), 36–40.
- Nugroho, D. (2017). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar (Studi Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(5), 862–871.
- Nurhafsyah Daulay, Girsang, E., & Manalu, P. (2021). *POTENSI DAN TANTANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN* Nurhafsyah Daulay 1 , Ermi Girsang 2 dan Putranto Manalu 3. 6, 137–157.
- Nuryanti, M. (2016). Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi danEvaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan KebijakanPublik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Robby, U. B., & Tarwini, W. (2019). INOVASI PELAYANAN PERIZINANMELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) Studi Pada Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINASPENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) Kabupaten Bekasi. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik DanPembangunan*, 10(2), 51–57. <https://doi.org/10.23960/administratio.v10i2.98>
- Rusnadiyah, R., Sumadinata, W. S., & (2021). Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Bandung Tahun : *Jurnal Pemikiran Dan*, 4(2), 105–123. <http://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/34735>
- Sari, R. P., & Rahayu, A. Y. S. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
<https://doi.org/10.31289>

Setiawan, A., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Program Gampil (Gadget Mobile Application For Licence) Di Kota Bandung Implementation Of The Gampil Program (Gadget Mobile Application For Licence) In Bandung City. 4(4), 195–203.

Sirajuddin, I. A. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DASAR BIDANG SOSIAL DI KOTA MAKASSAR.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Suparman, H. N., Tambunan, M., Hasibuan, S., Ramda, E., & Mangiri, D. (2021).

Implementasi OSS RBA di Daerah (Tantangan dan Kebutuhan Pemda). 47

Tahir, A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Gorontalo. Journal of Chemical Information and Modeling, XVI(03), 413–426.

Sumber Lain:

Jurnal/Skripsi/Tesis

Implementasi sebagai perluasan aktifitas, studi implementas. Browne, Wildavsky. 1993

Implementasi OSS RBA di Daerah Tantangan dan Kebutuhan Pemda Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah 2021.

Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk Anis Nur Fadhilah S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya Indah

Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Online Single Submission Riska Based Approach (OSSXRBA) Di Kabupaten Situbondo

Provinsi Jawa Timur. Rizal Bahroni, Margaretha Rumbekwan, Arwanto Harimas Ginting 2022

Implementasi Sistem Online Single Submission dalam Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka. Ade Hikmah Fitriani. 2021

Implementasi Online Single Submission (Oss) Dalam Meningkatkan Kualitas Perizinan (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan). Annisa Rakhmania Putri Sabillah, Rudy Handoko, Joko Widodo. 2020

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014. Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Artikel:

Dino Yudha. Penerapan New Publik Management di Indonesia, 29 Mei 2017, [http://fia-ub.blogspot.co.id/2012/06/perkembangan dan penerapan new public.html](http://fia-ub.blogspot.co.id/2012/06/perkembangan-dan-penerapan-new-public.html).

Taufik Akmal, Pelayanan Publik, 29 Mei 2017, <http://makalainet.blogspot.co.id/2013/10/pelayanan-publik.html>

Taufan Fahri Ramadhan, Merubah Pelayanan Publik di Indonesia, 29 Mei 2017, <http://topan08ramadhan.blogspot.co.id/2013/11/vbehaviorurldefaultvmlo.html>

https://dpmptsp.salatiga.go.id/v2/wp-content/uploads/2020/10/SKM_2019-compressed-20200819195832.pdf